

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan keberagaman suku bangsa, agama dan budaya masyarakatnya menjadikan kota tersebut sebagai kota kolaborasi yang nyaman bagi penduduk. Salah satu keberagaman yang dapat kita temui di dalam masyarakat Jakarta adalah keberagaman dalam hal agama. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2020, tercatat jumlah penduduk Jakarta sebanyak 11.100.929 jiwa dengan 9.289.491 jiwa di antaranya beragama Islam. Dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduknya beragama muslim, sehingga banyak ditemui berbagai jenis bangunan bercorak Islam tersebar di wilayah tersebut. Salah satu bangunan yang mendominasi adalah masjid.

Masjid merupakan tempat yang dibangun dengan tujuan untuk peribadatan umat Islam serta memiliki kedudukan sentral didalam masyarakat. Menurut Rochym (1983, hal. 15) masjid juga berkaitan erat dengan sarana kegiatan dalam menyebarkan agama. Selain itu, bangunan ini menjadi simbol perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui adanya pendirian sebuah Masjid Jakarta Islamic Centre yang terletak di wilayah Kramat Jaya, kel. Tugu Utara, kec. Koja, Jakarta Utara.

Masjid Jakarta Islamic Centre merupakan sebuah bangunan yang dahulu menjadi tempat lokalisasi rehabilitasi sosial (Lokres) Kramat Tunggak. Dalam pendiriannya, tempat tersebut menjadi simbol perubahan dari sisi kelam menuju sisi

terang yang berhasil diubah oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso. Secara geografis, wilayah Kramat Tunggak hanyalah sebuah rawa-rawa yang letaknya berada jauh dari pusat kota Jakarta Utara. Awalnya, lokasi ini memiliki luas wilayah sebesar 5 hektar, dengan dinding pembatas yang memisahkan antara kompleks lokres dengan kawasan tempat tinggal masyarakat. Kompleks tersebut dibagi menjadi delapan rukun tetangga yang disebut dengan nama kelompok teratai satu sampai delapan (Sedyaningsih, 2010, hal. 32). Pada akhir penutupanya, luas wilayah tersebut mencapai 11,5 hektar.

Secara demografis, wilayah Kramat Tunggak termasuk ke dalam kelurahan Tugu, dengan jumlah penduduk pada tahun 1976 sebesar 24.389 jiwa (Lembaga Kriminologi, 1977, hal. 13). Menurut data dari Kelurahan Tugu Utara ditahun yang sama, sebesar 40 % mayoritas penduduk di daerah tersebut bermata pencaharian sebagai buruh kasar, 30% sebagai pegawai negeri/swasta, 15% sebagai tani, 12% memiliki pekerjaan yang lain, serta 3% sebagai pedagang. Sementara dalam bidang pendidikan, terdapat 14 bangunan yang difungsikan sebagai sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut : 1 bangunan untuk Taman Kanak-Kanak, 5 bangunan untuk S.D. , 1 bangunan untuk S.D. Swasta, 5 bangunan untuk S.D. Islam Swasta, dan 2 bangunan untuk S.L.P. Minimnya lembaga pendidikan yang hadir ditengah-tengah masyarakat memunculkan permasalahan baru, yaitu buta huruf.

Untuk menangani permasalahan tersebut, masyarakat di wilayah Kelurahan Tugu mengadakan berbagai kursus, seperti kursus menjahit, kursus merajut, perawatan keluarga, pertamanan, narkoba, dan lain sebagainya. Permasalahan lain yang kerap kali muncul yakni dalam bidang sosial. Dimana masalah Tuna Karya,

seperti yatim-piatu/fakir-miskin serta masalah jompo menjadi prioritas utama yang harus ditangani Dinas Sosial dan juga pemerintah DKI Jakarta. Sementara untuk masalah Wanita Tuna Susila serta Germo sudah dapat ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta dengan menampung mereka dalam lokalisasi (Lembaga Kriminologi, 1977, hal. 19)

Lokalisasi Kramat Tunggak didirikan dan dilegalkan oleh Gubernur Jakarta yakni Ali Sadikin ditahun 1970 untuk mengubah wajah ibu kota supaya tidak terlihat kumuh dan jorok oleh adanya rumah-rumah prostitusi kecil yang berjejer disepanjang jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat (Hadimadja, 1993, hal. 206). Ide pendirian tersebut datang pada saat kunjungannya ke wilayah Bangkok, Thailand. Disana, ia melihat tempat-tempat prostitusi dalam satu kawasan yang disebut sebagai lokalisasi. Terilhami akan pola tersebut, Ali Sadikin berinisiatif untuk melokalisasi para wanita tuna susila ke wilayah Kramat Tunggak (Upa, Ridwan, & dkk, 2005, hal. 166).

Pendirian lokalisasi rehabilitasi sosial (lokres) tersebut diikuti dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur No. Ca.7/1/13/70 pertanggal 27 April 1970 mengenai usaha mengatasi keberadaan para wanita tuna susila di Jakarta (Sedyaningsih, 2010, hal. 36). Adapun tujuan pendiriannya yaitu memperkecil ruang gerak pekerja prostitusi yang tersebar di wilayah Jakarta sehingga dapat terkonsentrasi serta menjadi tempat pembinaan yang diawasi langsung oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Lokalisasi ini resmi berdiri melalui SK Gubernur No. Ca.7/1/54/72 tanggal 17 Juli 1972 mengenai status dan pengurusan kompleks Kramat Tunggak (Sedyaningsih, 2010, hal. 39).

Setelah resmi berdiri, jumlah pekerja Wanita Tuna Susila (WTS) yang menempati lokasi tersebut mencapai 300 orang dengan 76 mucikari. Jumlah tersebut kian bertambah seiring dengan ramainya pengunjung. Tercatat, dari tahun 1980-1990 jumlah WTS yang bekerja mencapai 2.000 orang dengan 258 orang pengasuh atau mucikari (Chodijah, 2003, hal. 15). Hingga akhir penutupannya di tahun 1999, jumlah WTS yang tersisa sekitar 1.600 orang dengan 258 orang mucikari. Jumlah yang cukup besar bagi tempat lokasi saat itu, sehingga dijuluki sebagai pusat pelacuran terbesar di Asia yang sifatnya dilegalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ramainya aktivitas prostitusi perlahan telah mendorong peningkatan jumlah infrastruktur yang dibangun di wilayah tersebut. Tercatat, hingga bulan Desember tahun 1999 sejumlah fasilitas umum telah berdiri, seperti pasar, sekolah, puskesmas, masjid, lembaga-lembaga masyarakat dan lain sebagainya. Menurut data Badan Pusat Statistik kecamatan Koja tahun 2000, jumlah sekolah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut : 106 SD, 82 SLTA, dan 38 SLTP (Sutrisno, 2003, hal. 36). Hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendidikan yang kala itu mayoritas masyarakatnya sudah berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi yang demikian menyebabkan berubahnya mata pencaharian masyarakat yang dahulu sebagai buruh kasar, kini bermata pencaharian sebagai pegawai swasta/negeri.

Selain itu, unit-unit bangunan di dalam kompleks Lokres pun mengalami perkembangan. Dimana rumah-rumah bordil yang sudah berdiri nampak semakin bagus, mewah dan terawat. Perkembangan yang signifikan tersebut pada akhirnya

menciptakan hubungan timbal-balik yang menguntungkan dengan terjalinnya hubungan ekonomi diantara penghuni Lokres dengan masyarakat sekitar wilayah kramat tunggak. Masyarakat sebagai penyedia jasa layanan bagi penghuni lokres nantinya akan memperoleh keuntungan begitupun sebaliknya. Jasa layanan yang tersedia diantaranya, yaitu: penjual makanan, jasa pijat, jasa cuci dan setrika baju, salon keliling, jasa pengantaran, jasa keamanan, dan sebagainya. Meskipun mereka hanya sebagai penyedia jasa layanan, namun keuntungan yang didapatkan berhasil membuat orang lain tertarik untuk mencoba peruntungannya. Alasan lain karena lokres tersebut dianggap mampu melindungi dan memberi kebebasan kepada mereka untuk berkiprah (Sutrisno, 2003, hal. 38).

Seiring berjalannya waktu, keberadaan justru tidak lagi sesuai dengan tujuan awal pendirian yaitu sebagai tempat lokalisasi dan rehabilitasi. Diakhir tahun 1990-an, mulai memunculkan persoalan baru bagi masyarakat di wilayah kramat tunggak. Pasalnya, kompleks yang semula berada jauh dari pusat kota perlahan mulai berdekatan dengan pemukiman masyarakat akibat pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Praktik prostitusi yang diharapkan terkonsentrasi disatu tempat justru bermunculan diluar wilayah Kramat Tunggak sehingga proses rehabilitasi yang digalakkan oleh pemerintah justru tidak berhasil memperkecil gerak mereka.

Selain itu, permasalahan yang muncul dalam segi ekonomi, dimana beberapa pihak, seperti industri minuman beralkohol, industri rokok, penjual alat kontrasepsi dan obat-obatan terlarang yang semakin gencar menjual barang dagangannya baik di wilayah kompleks kramat tunggak maupun diluar kompleks

(Sutrisno, 2003, hal. 5). Berbagai macam persoalan yang timbul pada akhirnya memunculkan masalah-masalah sosial baru dalam masyarakat, seperti meningkatnya jumlah kejahatan, kemiskinan dan lain sebagainya. Dengan demikian, tentu saja menimbulkan kekhawatiran bukan hanya di kalangan masyarakat Jakarta Utara namun juga dikalangan para ulama mengenai berbagai dampak yang akan terus dihasilkan jika keberadaan Lokres Kramat Tunggak tetap dipertahankan. Hal inilah yang tidak terpikirkan oleh pembuat kebijakan terdahulu mengenai dampak yang ditimbulkan dalam jangka panjang.

Keadaan yang demikian pada akhirnya memunculkan reaksi yang amat keras dari masyarakat agar Gubernur DKI Jakarta segera melakukan tindakan untuk menutup secara permanen wilayah Lokres Kramat Tunggak. Sebenarnya, berbagai macam penolakan sudah mulai muncul ketika lokres tersebut kian ramai oleh pengunjung serta berdekatan dengan penduduk. Namun, pemerintah setempat belum melihat hal tersebut sebagai suatu masalah yang berarti. Desakan ini akhirnya didengar oleh Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode tahun 1997-2002 dengan mengeluarkan berbagai langkah dan kebijakan terkait permasalahan tersebut.

Menurut Friedrich dalam (Handoyo, 2012, hal. 10) kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan, baik oleh individu, kelompok ataupun instansi yang didalamnya terdapat tantangan dan harapan untuk menangani berbagai permasalahan demi mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan serius ia mulai menangani permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 6485/1998 mengenai penutupan resmi Lokres Kramat

Tunggak. Keputusan tersebut diambil karena ia melihat bahwa keberadaan Lokres Kramat Tunggak sudah tidak lagi relevan dengan kemajuan zaman, terlebih ketika keberadaannya justru hanya menimbulkan kerugian.

Keputusannya untuk menutup Lokres tersebut bagaikan sebuah pisau bermata dua, dimana tentu akan terdapat banyak penolakan yang dihadapi terutama dari para penghuni Lokres dan masyarakat di wilayah lokres yang mendapatkan keuntungan. Disisi lain, penutupan lokres tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat yang menginginkan agar tempat maksiat tersebut berubah fungsi menjadi tempat yang memiliki nilai manfaat. Tidak mudah baginya dalam mengubah sebuah lokasi yang sudah berdiri kokoh selama hampir 30 tahun lamanya.

Sebelum dilakukan penutupan secara resmi, hal pertama yang harus dilakukan yakni memikirkan dan memilih solusi yang tepat demi kelanjutan hidup para penghuni lokres serta masyarakat yang terDampak akibat penutupan tersebut (Ridwan, 2001, hal. 18). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah gencar utnuk mensosialisasikan kepada penghuni terkait penutupan Lokres Kramat Tunggak agar tidak terjadi pergolakan. Sosialisasi yang dilakukan mencakup dua hal, yakni sosialisasi mental dan sosialisasi nonmental. Sosialisasi mental dilakukan dengan cara mendatangkan para ustadz untuk memberikan siraman rohani kepada para WTS dan juga mucikari. Sementara sosialisasi nonmental dilakukan dengan cara memberikan berbagai pelatihan, kursus, pembebasan lahan ataupun ganti rugi kepada semua pihak yang terdampak dalam penutupan lokres tersebut.

Sosialisasi tersebut berjalan selama satu tahun lamanya. Setelah program sosialisasi dapat terlaksana dengan baik, Gubernur DKI Jakarta yakni Sutiyoso secara resmi menutup Lokres Kramat Tunggak terhitung sejak tanggal 31 Desember 1999. Acara penutupan dilakukan secara sederhana oleh Sutiyoso melalui sebuah ucapan syukur serta pembukaan tirai dari papan pengumuman, pertanda bahwa Lokres Kramat Tunggak resmi ditutup.

Dalam perjalanan selanjutnya, wilayah bekas Lokres Kramat Tunggak ini menuai berbagai macam perdebatan terkait penggunaan fungsinya. Berbagai pihak saling melontarkan pendapat mengenai rencana pemanfaatannya, ada yang menyebut ingin dijadikan pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, rumah susun, ataupun sebagai tempat kegiatan sosial. Namun tentu saja, ada rencana penting terkait pemanfaatannya. Ide itu datang dari Gubernur DKI Jakarta itu sendiri yang menginginkan dibangunnya sebuah Masjid kebanggaan umat Islam di Jakarta selain Masjid Istiqlal. Ide tersebut didukung oleh berbagai pihak, khususnya oleh umat Islam sendiri.

Menurut Kartasasmita dalam (Azis, 2015, hal. 1) pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dengan perencanaan yang matang dengan tujuan untuk mengubah atau memperbaiki suatu kondisi menjadi lebih baik. Sementara itu dinamika dapat diartikan sebagai sesuatu energi atau gerakan yang terus berkembang dan mampu membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap keadaan. Dapat disimpulkan, bahwa dinamika pembangunan merupakan suatu proses gerakan yang penuh dengan semangat serta ambisi untuk melakukan sebuah perubahan dalam pembangunan.

Semangat perubahan inilah yang terus digelorakan oleh Sutiyoso untuk membangun suatu perubahan dalam kondisi yang ada. Setelah melalui jajak pendapat dari beberapa ahli, Sutiyoso memutuskan untuk membuat sebuah masjid dengan nama Masjid Jakarta Islamic Centre. Pembangunannya merupakan sebuah “Mega Proyek” yang harus diselesaikan ditengah krisis moneter yang tengah melanda wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta. Diharapkan pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre ini menjadi sebuah simbol peradaban umat Islam sekaligus menjadi pusat perkembangan dari berbagai jenis kegiatan umat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti Masjid Jakarta Islamic Centre: Dinamika Pembangunan di Tahun 1999 – 2003 sebagai topik skripsi, dikarenakan belum banyaknya pembahasan secara utuh mengenai proses pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre yang sukses dirubah oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu dari sebuah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara hingga menjadi sebuah masjid tempat peribadatan umat Islam. Selain itu, mengapa topik ini dipilih sebagai fokus dalam penelitian adalah karena Gubernur DKI Jakarta saat itu yakni Sutiyoso memiliki peran penting dalam proses perubahan wilayah bekas Lokres Keramat Tunggak. Ia berani mengambil kebijakan yang cukup konvensional dan menuai berbagai macam perdebatan dari masyarakat DKI Jakarta. Namun, kepiawaiannya dalam membaca dan melihat situasi membuat langkah-langkah yang ia buat memiliki dampak yang dapat dirasakan dikemudian hari. Dalam membangun Masjid Jakarta Islamic Centre, Sutiyoso berusaha untuk tetap bertahan pada pendiriannya untuk membangun masjid saat menghadapi krisis moneter yang tengah melanda wilayah Jakarta.

Terdapat dua tulisan yang secara khusus membahas mengenai proses pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre, yaitu buku yang berjudul *Jihad Sang Gubernur : Refleksi Kebijakan Sutiyoso Memutihkan Tanah Hitam di Jakarta* yang merupakan buku catatan kronologis yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Buku ini hanya fokus kepada proses pembangunan masjid yang masih berjalan serta tidak menjabarkan hasil akhir dan Dampak yang dihasilkan baik sebelum ataupun sesudah adanya Masjid Jakarta Islamic Centre. Kemudian, buku ini juga belum dapat dikatakan objektif karena dalam proses penulisan ataupun penerbitannya melibatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta, sehingga terdapat bagian yang masih menjaga citra dari Sutiyoso.

Selanjutnya terdapat pula skripsi karya Mulyadi dengan judul *Peranan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) dalam Memajukan Islam di Jakarta (2003-2016)*. Tulisan ini secara spesifik membahas mengenai perkembangan dan peranan yang dihasilkan Jakarta Islamic Centre selama hampir 13 tahun berdiri. Selain itu, tulisan ini juga menjelaskan mengenai Dampak yang dihasilkan dari adanya Lokres Kramat Tunggak bagi masyarakat di wilayah Kramat Jaya Raya, Jakarta Utara. Tulisan ini juga memuat perkembangan JIC (Jakarta Islamic Centre) dalam beberapa masa kepemimpinan.

Perbedaan dari tulisan-tulisan diatas dengan penelitian skripsi ini adalah secara khusus penelitian ini akan difokuskan untuk membahas dinamika dalam proses pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre (1999-2003), langkah serta kebijakan yang dikeluarkan, serta Dampak yang dihasilkan dari adanya Masjid

Jakarta Islamic Centre, yang belum dibahas dalam dua tulisan diatas ataupun tulisan yang lain.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Batasan temporal yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah antara tahun 1999-2003. Peneliti mengambil tahun 1999 sebagai batasan temporal awal penelitian karena pada tahun tersebut Sutiyoso secara resmi menutup Lokalisasi Rehabilitasi Sosial (Lokres) Kramat Tunggak yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Adapun batasan temporal akhir dalam penelitian ini adalah tahun 2003 karena ditahun tersebut pemerintah DKI Jakarta telah meresmikan Masjid Jakarta Islamic Centre sebagai sebuah pusat pengembangan peradaban Islam di wilayah Jakarta di tanggal 4 Maret 2003. Peresmian ini mejadi titik tombak perubahan baru dari yang sebelumnya tempat prostitusi menjadi sebuah tempat pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta.

Terdapat juga batasan tematis dalam penelitian ini yakni memfokuskan pada dinamika pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre. Dalam hal ini terlihat sebuah gerakan dan semangat yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk mengubah sebuah tempat prostitusi menjadi tempat yang bermanfaat untuk masyarakat di wilayahnya dengan melakukan pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre. Sedangkan untuk batasan spasial, penelitian ini memusatkan perhatian pada wilayah Kramat Jaya Raya, kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dimana wilayah tersebut

merupakan bekas Lokres Kramat Tunggak yang kemudian berubah menjadi Masjid Jakarta Islamic Centre.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan untuk proposal ini adalah:

1. Bagaimana dinamika dalam proses pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre setelah dikeluarkannya kebijakan penutupan Lokres Kramat Tunggak?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian berjudul Masjid Jakarta Islamic Centre: Dinamika Pembangunan di Tahun 1999 – 2003 dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur DKI Jakarta periode tahun 1997 – 2002 yakni Sutiyoso mengenai solusi yang dihadirkan dalam proses perubahan wilayah lokalisasi hingga menjadi sebuah masjid. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang mendasari dilakukannya pembangunan masjid, upaya, tantangan serta respon yang ditimbulkan pasca dibangunnya Masjid Jakarta Islamic Centre terhadap masyarakat di wilayah Jakarta Utara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi sejarah lokal Jakarta, khususnya mengenai sejarah pembangunan peradaban Islam berupa masjid pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta era Sutiyoso.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan adalah memberikan tambahan literatur dan informasi untuk masyarakat umum khususnya masyarakat Jakarta dan juga sebagai bahan studi tambahan baik ditingkat sekolah menengah atas maupun universitas khususnya Prodi Pendidikan Sejarah.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sebuah penelitian ataupun penulisan mutlak diperlukan suatu metode guna mendapatkan hasil/objek yang bersifat ilmiah (Pranoto, 2010, hal. 11). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dalam bentuk deskriptif-naratif untuk menguraikan dan menyatukan peristiwa-peristiwa dalam batas ruang dan waktu menjadi satu bagian yang utuh. Menurut Kuntowijoyo (2013, hal. 69) untuk mencapai tujuan penelitian dalam merekonstruksi sebuah peristiwa secara kritis menjadi satu kesatuan, maka penulisan sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan

topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan suatu proses dalam memilih tema yang akan dibahas dalam penelitian. Menurut Kuntowijoyo (2013, hal. 70) dalam melakukan pemilihan topik sebaiknya didasarkan atas dua kedekatan, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai dinamika pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre karena pendirian masjid tersebut merupakan suatu perubahan fungsi yang sebelumnya merupakan tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Lokalisasi Kramat Tunggak kini berubah menjadi sebuah Masjid sebagai pusat pengkajian dan pengembangan peradaban Islam di Jakarta. Pengalihfungsian tempat tersebut dapat berjalan setelah dikeluarkannya kebijakan untuk menutup lokalisasi Kramat Tunggak oleh Sutiyoso selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

b. Pengumpulan Sumber

Setelah menentukan topik penelitian, tahap selanjutnya yaitu pengumpulan sumber atau *heuristik*. Menurut Louis Gottschalk (1983, hal. 18) pengumpulan sumber dapat diperoleh melalui sumber tertulis dan lisan yang relevan. Untuk pengumpulan sumber yang telah didapatkan oleh penulis terbagi menjadi dua jenis, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan melalui wawancara, arsip-arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta foto-foto proses pembangunan

Masjid Jakarta Islamic Centre. Sumber primer yang telah didapatkan oleh penulis yaitu Surat Keputusan Gubernur No. 6485/1998, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7220/1998, dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3609/2000. Peneliti juga mendapatkan sumber yang sezaman yakni koran pada periode tahun 1998 - 2003.

Selain itu, peneliti juga mendapatkan sumber sekunder berupa hasil wawancara, buku-buku ataupun jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Perpustakaan Masjid Jakarta Islamic Centre. Sumber sekunder tersebut diantaranya: buku yang berjudul “Perempuan-perempuan Kramat Tunggak”, “Jihad Sang Gubernur: Refleksi Kebijakan Sutiyoso Memutihkan Tanah Hitam di Jakarta”, “Jakarta Islamic Centre: Dari Ufuk Timur Yang Cemerlang” serta karya ilmiah berupa skripsi karya Mulyadi dengan judul “Peranan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (*Jakarta Islamic Centre*)”, serta tesis karya Sutrisno dengan judul “Dampak penutupan lokalisasi/ WTS Kramat Tunggak terhadap masyarakat Kelurahan Tugu Utara”.

c. Kritik Sumber

Setelah memperoleh sumber-sumber yang relevan, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu kritik sumber. Menurut Pranoto (2010, hal. 35) kritik sumber merupakan sebuah proses pengujian sumber-sumber yang telah didapat untuk dibandingkan dengan sumber lain guna

mendapatkan sumber yang orisinal dan kredibel. Kritik sumber sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu: kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan proses pengujian yang berfokus terhadap kebenaran dari sumber-sumber yang telah diperoleh dengan membandingkan satu sama lain. Dalam penelitian ini, kritik intern yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan kumpulan koran-koran dengan buku yang berjudul “Jihad Sang Gubernur: Refleksi Kebijakan Sutiyoso Memutihkan Tanah Hitam di Jakarta” untuk mengetahui kebenaran dari sumber yang telah diperoleh. Kemudian, kritik ekstern merupakan proses pengujian yang berfokus pada keaslian/orisinalitas sumber dengan mengamati penampilan dari segi fisik sumber tersebut. Dalam penelitian ini, kritik ekstern yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati penampilan fisik dari arsip-arsip, foto dan juga koran-koran yang diterbitkan dalam periode tahun 1999 – 2003.

d. Interpretasi

Tahapan selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran sumber. Menurut Notosusanto dalam karya Sulasman (2014, hal. 75) interpretasi merupakan proses penetapan makna yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang telah di verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti mulai merekonstruksi fakta-fakta yang telah diverifikasi untuk menjadi suatu kisah sejarah yang utuh. Sumber-sumber yang berhasil diverifikasi, seperti buku yang berjudul “Jihad Sang Gubernur: Refleksi Kebijakan Sutiyoso Memutihkan Tanah Hitam di Jakarta”, arsip, foto maupun koran-koran yang diterbitkan dalam

periode tahun 1999 – 2003 dapat dilakukan penafsiran dari hasil fakta-fakta yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

e. Penulisan

Tahapan terakhir yaitu penulisan sejarah atau historiografi. Terdapat dua teknik dalam penulisan sejarah, yaitu deskriptif-naratif dan deskriptif-analisis. Teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif-naratif. Pada tahap ini, peneliti dapat menuliskan fakta-fakta yang relevan menjadi sebuah karya tulis sejarah yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan keasliannya.

Penulisannya terbagi menjadi empat bab yang terdiri dari pendahuluan, kondisi umum kramat tunggal, dinamika pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre, dan kesimpulan. Bab pendahuluan merupakan bab awal yang terdiri 5 sub bab yakni dasar pemikiran, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan bahan sumber serta jadwal penelitian. Sub bab dasar pemikiran berisi mengenai latar belakang pembahasan penelitian, alasan dan motivasi peneliti serta penelitian-penelitian yang relevan dengan topik yang diangkat. Sub bab pembatasan dan perumusan masalah berisi mengenai batas-batas dan pertanyaan yang diangkat dalam penelitian. Sub bab metode dan bahan sumber berisi mengenai metode yang digunakan peneliti serta sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab terakhir jadwal penelitian berisi jadwal penelitian yang dilakukan dari awal hingga berakhirnya penelitian.

Bab kedua yakni kondisi umum Kramat Tunggak yang terbagi ke dalam tiga sub bab. Sub bab pertama yakni kondisi awal Kramat Tunggak berisi situasi kramat tunggak sebelum menjadi sebuah lokres. Sub bab kedua yakni ide awal dan penerapan kebijakan lokalisasi berisi mengenai ide pemanfaatan lahan, payung hukum serta penerapan kebijakan yang dikeluarkan Ali Sadikin. Sub bab terakhir yakni perkembangan Lokres Kramat Tunggak berisi kondisi lokres kramtung dari awal pembangunan di tahun 1970 sampai tahun 1998 sebelum penutupan.

Bab ketiga yakni dinamika pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre yang terbagi atas lima sub bab. Sub bab pertama yakni Sutiyoso dan kebijakannya berisi penggambaran Sutiyoso selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 1997 -2002, kebijakan yang ia ambil, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani penutupan lokres. Sub bab kedua yakni problematika pasca penutupan berisi permasalahan-permasalahan yang timbul selepas penutupan resmi oleh pemerintah. Sub bab selanjutnya gagasan pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre berisi ide pemanfaatan lokres yang digulirkan Sutiyoso, konsep islamic centre, jajak pendapat atas gagasan Sutiyoso kepada publik, serta masterplan dan pendanaan. Sub bab selanjutnya yakni pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre berisi proses pembangunan masjid mulai dari peletakaan batu pertama, tahapan pembangunan, studi banding empat negara hingga peresmian di tahun 2003. Sub bab terakhir yakni respon masyarakat terhadap pembangunan Masjid

Jakarta Islamic Centre berisi berbagai tanggapan masyarakat dari berbagai kalangan atas pembangunan Masjid JIC.

Bab terakhir yakni kesimpulan. Bab ini berisi rangkuman atau hasil akhir dari rangkaian penelitian mengenai dinamika pembangunan Masjid JIC dari tahun 1999 – 2003. Bab ini juga menjabarkan hasil dari pertanyaan yang dituliskan dalam rumusan masalah sehingga tercipta benang merah dalam penelitiannya.

2. Bahan Sumber

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan melalui wawancara, arsip-arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta foto-foto pembangunan Masjid JIC. Terdapat juga sumber sezaman yakni koran periode tahun 1998 – 2003.

Selain mendapatkan sumber primer, peneliti juga mengumpulkan sumber sekunder yaitu berbagai literatur buku ataupun jurnal penelitian yang membahas mengenai kebijakan Sutiyoso dalam pembangunan Masjid Jakarta Islamic Centre. Buku-buku tersebut antara lain buku pemerintah provinsi DKI Jakarta “*Jihad Sang Gubernur: Refleksi Kebijakan Sutiyoso Memutihkan Tanah Hitam di Jakarta*” dan “*Jakarta Islamic Centre: Dari Ufuk Timur Yang Cemerlang*”, buku tulisan Yamin Pua Upa, dkk “*Jakarta Megapolitan Kreasi dan Inovasi Sutiyoso*”, buku karya Firman Yursak, dkk “*Kepemimpinan Sutiyoso Di Mata Publik*”, Buku karya Asrori S. Kami, dkk “*Gubernur Sutiyoso di mata ulama*”, buku karya Endang R. Sedyaningsih-Mamahit

“*Perempuan-perempuan Kramat Tunggak*”. Selain buku, terdapat pula karya ilmiah berupa jurnal, skripsi ataupun tesis yang diantaranya adalah Skripsi karya Saidun Derani “*Peranan Pusat Pengkajian Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) dalam Memajukan Islam di Jakarta (2003-2016)*”, Tesis karya Sutrisno “*Dampak penutupan lokalisasi/resolisasi Kramat Tunggak terhadap masyarakat Kelurahan Tugu Utara*”.

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan waktu yang terpisah. Tahapan pertama yakni penyusunan dan penulisan proposal dilakukan selama 3 bulan yakni Oktober – Desember 2021. Setelah proses tersebut selesai, selanjutnya dilakukan proses pengumpulan sumber-sumber relevan, kritik sumber, interpretasi terhadap fakta-fakta sumber yang dikumpulkan serta penulisan. Untuk proses ini sendiri peneliti melakukannya dalam kurun waktu 11 bulan yakni Juli 2022 – Mei 2023. Untuk mengetahui lebih jelas jadwal penelitian dapat melihat bagan dibawah ini.

Kegiatan	Waktu Penelitian
Penulisan Proposal	Oktober – Desember 2021
Pengumpulan Sumber	Juli 2022 – Januari 2023
Penulisan / Penyusunan Skripsi	Februari – Mei 2023